ANALISIS KEMAMPUAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL SWASTA DALAM MENDUKUNG KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI AL

ANALYSIS CAPABILITIES PRIVATE SHIPYARD IN SUPPORT OF MAIN EQUIPMENT WEAPON SYSTEM NAVY (CASE STUDY AT PT.PALINDO MARINE & PT.KARIMUN ANUGERAH SEJATI)

Lukman Yudho Prakoso¹, Apriyani²

Abstrak - Badan Umum Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, memiliki fungsi dan peranan yang terbagi atas berbagai macam bentuk usaha. Tujuannya adalah mencari keuntungan seoptimal mungkin dalam mengembangkan usaha dan modal serta membuka lapangan kerja. Pemerintah melalui UU No.16 tahun 2012 memberikan payung hukum kepada BUMS untuk memberdayakan galangan kapal swasta mendukung kebutuhan alutsista TNI AL. Rencana Strategis minimum essential force ketiga berakhir tahun 2024, diprogramkan tercapai target 24 kapal cepat rudal (KCR) dan 44 patrol combat (PC). PT Palindo Marines merupakan galangan kapal swasta yang mendapatkan kepercayaan dari TNI AL didukung satu perusahaan lainnya yang berada di Batam yaitu PT Karimun Anugerah Sejati. Kedua perusahaan dikenal memiliki kredibilitas kinerja yang tinggi dan profesional menyelesaikan kapal kapal sebelumnya. Menghadapi kekuatan dan ancaman dari negara lain, kebijakan pemerintah membangun kapal perang dengan mengutamakan galangan kapal dalam negeri kecuali benarbenar tidak mampu dilaksanakan. Peneliti menggunakan metode kwalitatif deskriptif untuk menganalisis kemampuan galangan kapal, faktor faktor yang mendukung dan menghambat perusahaan. Analisis SWOT menghitung kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, untuk memberikan solusi pilihan strategi terbaik bagi perusahaan. Pembangunan kapal perang memerlukan keahlian desain, penguasaan platform dan sewaco serta team khusus dibandingkan dengan membuat kapal niaga umumnya. Hasil penelitian menunjukkan potensi dan kemampuan galangan kapal PT.Palindo Marine dan PT.Karimun Anugerah Sejati dapat berperan lebih besar mendukung kebutuhan alutsista TNI AL.

Kata kunci: BUMS, Alusista, kemampuan galangan kapal swasta

Abstract - Works Agency for Private Owned (BUMS) is a business entity whose capital is owned by private parties, functions and roles are divided into various forms of business. The goal is for profit optimally as possible in developing the business and capital and employment. Government through Act 16 of 2012 provides a legal umbrella for BUMS to empower private shipyards to support the needs of the Navy defense equipment. Strategic Plan ended the third minimum essential force in 2024, achieved the target of 24 programmed missile fast boats (KCR) and 44 patrol combat (PC). PT Palindo Marines is a private shipyards to get the confidence of the Navy supported the other companies located in Batam, PT Karimun Anugerah Sejati. Both companies are known to have high credibility and professional performance to complete the order quick ship orders the Navy. Development of military power is always faced with the strength calculation and threats from other countries. The government's policy to build warships with emphasis on domestic shipyards realized with the

support of duty-free value added tax for the components that have to come from abroad specially in Batam, Bintan and Karimun. The policy gives hope for investors, especially in the field of construction and ship repair in Batam. Booking warships abroad when domestic shipyards really can not afford because it requires high technology. Researchers used descriptive qualitative method to analyze the ability of shipbuilding, the factors that support and hinder the company. SWOT Analysis calculates the strengths, weaknesses, opportunities and threats, to provide the best solution for the company's strategic choice. The construction of warships require design expertise, mastery and sewaco platform as well as special teams compared to making commercial ships generally. The results show the potential and ability PT.Palindo Marine shipyard and PT.Karimun Anugerah Sejati can play a larger role supporting the needs of defense equipment Navy.

Keywords: BUMS, Alusista, shipbuilding capability private

Pendahuluan

UMS dibedakan dua jenis yaitu badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak masyarakat dalam negeri. Sedangkan arti dari badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya miliki oleh masyarakat asing. Beberapa badan usaha swasta bidang galangan kapal sudah membangun kapal perang di Indonesia, kegiatan tersebut terhenti pada tahun 1998 seiring dengan kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada pembangunan maritim. Perusahaan galangan kapal swasta tetap melaksanakan kegiatan dengan membangun kapal-kapal untuk keperluan sipil yaitu kapal niaga, angkutan dan personil. Pergantian pemerintahan dan kebijakan perubahan pembangunan maritim memberikan harapan yang lebih besar kepada galangan kapal swasta. Galangan kapal swasta di Indonesia yang bergerak pada bidang produksi dan perbaikan kapal mencapai ratusan perusahaan, beberapa diantaranya mendukung bergabung kebutuhan TNI ALpada Alutsista bidang pembangunan KRI. Perusahaan galangan kapal swasta di Batam PT.Palindo Marine dan PT.Karimun Anugerah Sejati memiliki pengalaman membangun kapal cepat pesanan TNI AL yang dilanjutkan dengan kontrak pembangunan kapal cepat saat ini. PT.Palindo Marine sudah beroperasi membangun dan memperbaiki kapal sejak 35 tahun yang lalu. Galangan ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga terus berkembang mengikuti ikut kebutuhan dan pasar serta mendukung kebutuhan alutsista TNI AL, dalam hal pembangunan KRI. Prestasi dan kwalitas produksi perusahaan ini, merupakan bagian dari pertimbangan diterimanya sebagai mitra kerja TNI AL.

Selain PT.Palindo Marine, satu perusahaan baru yang memiliki kwalitas produksi yang baik adalah PT.Karimun Anugerah Sejati, dengan lokasi galangan kapal sangat dekat dengan PT.Palindo Marine. Kebijakan pembangunan KCR di negeri terutama dalam pada perusahaan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2010, dengan hasil produksi yang sudah digunakan operasi oleh TNI AL vaitu KRI Celurit, KRI Kujang, KRI Baladau, KRI Alamang, KRI Suric, KRI Siwar dan KRI Parang. Deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan agenda pembangunan difokuskan pada lima pilar utama yaitu, pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. *Ketiga*, memberi perioritas pada pembagunan infrastruktur maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan maritim. pariwisata Keempat, menerapkan diplomasi maritim melalui usulan peningkatan kerjasama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti: pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus

menyatukan berbagai bangsa dan negara, bukan memisahkan. *Kelima*, membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggungjawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Pada ayat (2) pasal 20 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dinyatakan bahwa segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai tekhnologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur lebih lanjut dengan aturan pemerintah. Galangan kapal swasta merupakan sumber daya buatan yang dapat mendukung industri pertahanan bidang maritim, di antaranya adalah galangan kapal swasta PT. Karimun Anugerah Sejati dan PT. Palindo Marine di Batam. Peranan kedua perusahaan tersebut swasta mendukung pembangunan kapal-kapal Angkatan Laut. Kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang dimiliki TNI AL idealnya berjumlah 274 KRI untuk menjaga dan mengamankan perairan yurisdiksi Nasional Indonesia. Sampai tahun 2024, pencapaian program MEF diharapkan dapat memenuhi target 190 KRI.

UU No. 16 Tahun 2012 mendefinisikan Industri Pertahanan sebagai industri nasional yang terdiri dari BUMN dan BUMS baik yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan dan keamanan, pertahanan jasa pemeliharaan untuk kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah NKRI. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidangbidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis. Menurut Permenhan No. 39 Tahun 2015, pemberdayaan pendayagunaan Industri Pertahanan dalam mendukung pembangunan MEF TNI diwujudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan Alutsista dan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan secara berkelanjutan. Kepastian pemenuhan Alutsista diperlukan untuk menyusun Rencana Pembangunan Pertahanan Jangka Panjang sesuai dengan rencana strategis. Industri Pertahanan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan berperan dalam turut serta menggairahkan pertumbuhan industri secara nasional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menganalisis

kemampuan perusahaan dengan analisa SWOT dan kesimpulan kemampuan dua perusahaan yang diteliti. Pengumpulan data perusahaan galangan kapal swasta dilanjutkan pengumpulan data primer diambil dari hasil wawancara kepada narasumber di lingkungan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Angkatan Laut , Satuan Tugas Peroyek Pengadaan KRI dan direktur perusahaan beserta staff data dua disertai pengumpulan perusahaan yang diteliti. Data sekunder diambil dari referensi buku, internet, buku pedoman, peraturan perundangan, hasil penelitian sebelumnya (disertasi, tesis, jurnal) dan berita terkait.

Hasil dan Pembahasan

Data Penelitian

Kemampuan galangan kapal di Indonesia belum termanfaatkan secara optimal karena perusahaan perkapalan dan pelayaran di Indonesia masih didominasi oleh produk kapal impor. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, dari total kapal yang beroperasi di perairan Indonesia saat ini, 90 persen merupakan kapal produk impor dan hanya 10 persen saja kapal produk galangan sendiri. Kondisi tersebut disebabkan harga kapal produksi luar negeri 30 persen lebih murah dibandingkan harga kapal produksi di dalam negeri. Sementara itu, menurut

data Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian

Perindustrian, pada tahun 2014, Indonesia hanya memproduksi 72 unit kapal dari berbagai jenis dan ukuran. Angka produksi tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan galangan kapal yang ada. Rasio jumlah galangan kapal dengan produksi hanya 1: o,8. Ini berarti, secara rata-rata, pada 2014 terdapat tahun 20 persen perusahaan galangan kapal yang tidak membangun kapal baru.

PT. Palindo Marine Shipyard adalah sebuah perusahaan galangan kapal di Pulau Batam dengan jarak terdekat ke Singapura. Perusahaan ini memproduksi kapal dari berbagai jenis dan ukuran dengan menggunakan bahan baku utama GRP (sandwich), baja, dan aluminium. Selama 20 tahun beroperasi, PT. Palindo Marine Shipyard telah memproduksi sekitar 200 unit kapal berbagai tipe dan ukuran. Sejak tahun perusahaan ini berhasil 2007, mengembangkan produksi kapal cepat dan kapal feri. Pelanggan utama yaitu perusahaan pelayaran di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selain itu, PT. Palindo Marine Shipyard mem-produksi kapal dari badan-badan pesanan

pemerintah di Indonesia, seperti: Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementeri-an Kehutanan, SAR, serta lembaga lainnya (*Indec*, 2015).

PT. Palindo Marine memiliki fasilitas seluas 70.000 m² yang masih untuk berkembang direncanakan kembali. Fasilitas yang ada sekarang mampu memproduksi enam unit kapal baja aluminium sepanjang 40 meter per Peningkatan tahunnya. kapasitas produksi dapat dilakukan dengan menambah workshop. Saat ini, PT. Palindo Marine telah melakukan perluasan workshop yang memungkinkan kapasitas produksi perusahaan menjadi 53 kapal per tahun. Tingkat kesiapan teknologi produk PT. Palindo Marine dilakukan pada tiga produk kapal terbaru. Analisa ini dilakukan dengan membandingkan indikator yang ada pada tiap level kesiapan teknologi dengan kondisi masing-masing produk kapal laut PT. Palindo Marine. KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 merupakan jenis kapal cepat rudal. KCR 40 adalah prestasi terbesar Palindo Marine. Desain kapal ini dikerjakan bersama-sama dengan SDM ITB dan ITS untuk memenuhi requirement TNI-AL. Bahan dasar yang dipakai adalah perpaduan baja aluminum. Bagian lambung terbuat dari baja khusus High

Tensile Steel dari Krakatau Steel, sedangkan bagian atas memakai aluminium yang ringan sehingga kecepatan kapal bisa dioptimalkan. Dengan panjang 44 m, kecepatan yang mampu dicapai adalah 30 knot. Sistem pendorong yang dipakai adalah fixed propeller lima daun. Sistem senjata yang digunakan adalah dua unit senapan mesin kaliber 20 mm, 30 mm enam laras, Sensor Weapon Control (Sewaco), serta peluru kendali 2 set rudal C-705.

PT. Karimun Anugerah Sejati (PT. KAS) berlokasi di Tanjung Uncang, Batam; dioperasionalkan dengan sistem perusahaan yang menilai kebutuhan pasar pengguna. Untuk memaksimalkan desain kapal yang dibuat, PT. KAS memperkerjakan satu tenaga luar sebagai desainer tetap. Sebagai perusahaan yang tergolong baru dibandingkan dengan PT. Palindo Marine, perusahaan ini mengalami kemajuan pesat. Saat ini sedang menambah area workshop agar dapat memiliki kapasitas yang memadai. Area produksi yang baru dalam tahap penyempurnaan akan sangat mendukung dan memperlancar pembangunan kapal. Kemampuan galangan kapal PT. KAS Batam yang baru beroperasi dalam waktu lima tahun terakhir dalam bidang pembangunan kapal perang, hasil

produksinya memenuhi persyaratan yang diperlukan TNI-AL. Hal ini sudah diwujudkan dengan selesainya KRI Sidat dan KRI Terapang serta tidak terlepas dari manajemen perusahaan yang menggunakan standar kelas Bureau Veritas (BV) untuk menyelesaikan produksi kapal. Kerja sama dengan perusahaan pendukung material cukup baik dan memiliki tenaga desainer luar sebagai tenaga tetap dalam perusahaan, didukung sarana workshop dengan area yang cukup luas. Secara umum, PT. KAS Batam mampu membangun kapal dengan tipe lebih besar pada bidang platform kapal dan harus bekerja sama dengan pihak lain yang menguasai bidang sewaco.

Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 250 perusahaan galangan kapal termasuk perusahaan fabrikasi struktur lepas pantai (offshore struc-ture), fabrikasi bahan, mesin dan peralatan kapal, serta perusahaan jasa desain, teknik, survei, inspeksi dan konsultasi kemaritiman. Dari jumlah tersebut, mayoritas galangan kapal berlokasi di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan proporsi seperti disajikan dalam gambar berikut. Industri galangan kapal di Indonesia paling banyak beroperasi di wilayah Batam, Provinsi Kepulauan Riau yaitu 108 unit galangan atau 43% dari total perusahaan galangan kapal di seluruh Indonesia. Sementara itu, di Pulau Jawa terdapat 98 unit galangan (39%) dan sisanya 44 unit (18%) berada di luar wilayah Batam dan Pulau Jawa.

Sementara itu, menurut data Kementerian Perindustrian, perusahaan galangan kapal di Indonesia terdapat sebanyak 90 perusahaan. Galangan kapal yang dimaksud adalah perusahaan yang fokus pada layanan docking, new ship building, ship repair, ship maintenance, dan ship conversion. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 perusahaan galangan berlokasi di Batam, dan selebihnya tersebar di 14 lokasi lain. Berdasarkan status perusahaannya, galangan kapal di Indonesia meliputi perusahaan galangan kapal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak empat perseroan yaitu, PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero) di Surabaya, PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) di Surabaya, PT.Dok dan Perkapalan Koja Bahari (DKB) di Jakarta, PT. Industri Kapal Indonesia (IKI) di Makassar.

Perusahaan galangan kapal swasta, terdiri dari, perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), perusahaan *join ventura* (kerja sama perusahaan asing dan perusahaan

domestik). Untuk memadukan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik perlu adanya peningkatan sinergitas. Menurut Covey, siner-gisitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Covey menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Indonesia sebagai negara maritim memiliki visi dan misi sebagai Poros Maritim Dunia. Beberapa poin Nawacita yang dideklarasikan oleh Presiden Joko Widodo berpandangan tentang pentingnya menghidupkan kembali kemaritiman karena dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan dengan sumber daya besar yang belum dikelola dengan baik. Jauh sebelumnya, Presiden pertama RI Soekarno sudah berwawasan maritim sebagaimana penggalan peresmian pidatonya pada upacara berdirinya Institute Angkatan Laut (IAL)

tahun 1953 di Surabaya,

"... Usahakan agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya..., pelaut dalam arti bangsa seluas-luasnya. Bukan sekedar jongos-jongos menjadi kapal... bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang itu sendiri. lautan (Marsetio, 2014, hal. iii).

Pembahasan

maritim tidak Pembangunan dapat dipisahkan dari Industri Pertahanan dalam negeri yang terdiri dari BUMN dan BUMS untuk membangun armada kapal niaga dan BUMS memiliki kapal perang, peluang besar dengan adanya program MEF TNI AL yang memerlukan banyak KRI didukung kebijakan pemerintah yang mengutamakan komponen dalam negeri. Pemenuhan MEF juga diarahkan untuk mendukung Lima Pilar Utama Indonesia Maritim Dunia. Pilar sebagai Poros pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, ditentukan sangat oleh bagaimana

Indonesia mengelola samudera. Pilar kedua, komitmen menjaga dan mengelola laut dengan sumber daya fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur konektivitas dan maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Pilar keempat, agenda pembangunan adalah diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan. Pilar kelima, Poros Maritim Dunia adalah membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim. Indonesia juga berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan dan Samudra Pasifik, serta menginginkan situasi di kedua kawasan samudera itu tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim.

Analisis SWOT, merupakan singkatan dari Strenght (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), Threat (ancaman) merupakan

alat analisis yang mendasarkan kepada melihat kekuatan kemampuan baik internal maupun eksternal yang dimiliki perusahaan dibanding perusahaan pesaing. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis situasi atau kondisi, sehingga dapat merumuskan strategi perusahaan dalam persaingan mendapatkan pesanan pembangunan **SWOT** kapal di pasaran. Analisis dilaksanakan dengan perhitungan bobot dan rating perusahaan, dengan hasil posisi kedua perusahaan berada pada kwadrant pertama vaitu kombinasi dan peluang yang harus kekuatan ditindaklanjuti untuk meraih kesuksesan.

Kemampuan PT.Palindo Marine

Analisis penelitian mengguna-kan metode SWOT yang dibagi dalam empat bagian: Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Menurut Rangkuti (2006) bahwa analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, secara bersamaan namun dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT berdasarkan informasi dari faktor memengaruhi yang untuk membandingkan faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan kendala serta

faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan, maka selanjutnya informasi tersebut dimanfaatkan dalam model kuantitatif perumusan strategi dengan model analisis matrik SWOT.

Hasil perhitungan SWOT, berada pada kuadran satu pada area Growth Oriented Strategy. Strategi yang harus disusun yaitu melanjutkan peningkatan kemampuan SDM perusahaan dengan mengikutkan pada keterampilan dan keahlian tertentu sesuai bidang dan kapasitasnya dalam perusahaan. Strategi dari hasil analisis SWOT tidak semua dipilih untuk dikembangkan. Peluang dan kendala mempengaruhi yang memberikan pilihan strategi kepada pengambil kebijakan yang dapat menilai strategi alternatif sebagai pilihan perusahaan. Strategi untuk meningkatkan kemampuan industri galangan kapal swasta PT. Palindo Marine dalam mendukung kebutuhan Alutsista TNI AL adalah sebagai berikut. Rumusan strategi untuk meningkatkan kemampuan industri galangan kapal swasta PT. Palindo dalam mendukung industri pertahanan adalah sebagai berikut.

 a. Strategi 1: perusahaan galangan kapal swasta dalam hal ini PT. Palindo Marine tetap melanjutkan peningkatan kemampuan karyawan yang selama ini

- sudah terealisasi dan menggunakan standar BV untuk pembangunan KRI.
- b. Strategi 2: meningkatkan kerjasama dengan TNI-AL dan Kementerian dalam membangun kapal serta menambah personil yang memiliki keahlian sensor weapon and console;
- c. Strategi 3: melaksanakan perhitungan dan penjelasan yang lebih rinci tentang spesifikasi teknis kapal pada saat seatrial dan setelah operasional untuk memenuhi operasional requirment Sopsal, pemilih-an mesin kapal yang tepat dan ketersediaan anggaran.

Kemampuan PT. Karimun Anugerah Sejati

Hasil perhitungan SWOT menempatkan perusahaan berada pada kuadran satu pada area *Growth Oriented Strategy* sehingga strategi yang harus disusun yaitu yaitu menambah sarana dan prasarana produksi dan mengambil peluang dari program pengadaan kapal TNI-AL. Strategi untuk meningkatkan kemampuan industri galangan kapal swasta PT. Karimun Anugerah Sejati dalam mendukung Alutsista TNI AL adalah sebagai berikut.

 a. Strategi 1: perusahaan galangan kapal swasta dalam hal ini PT. Karimun Anugerah Sejati tetap konsisten menggunakan standar BV untuk

- pembangunan KRI.
- b. Strategi 2: melengkapi sarasana prasarana workshop, meningkatkan kinerja karyawan, dan mengecek kualitas produksi secara berkala.
- c. Strategi 3: mengantisipasi perhitungan detail tentang spesifikasi teknis kapal pada saat seatrial dan setelah operasional untuk memenuhi operasional requirment Sopsal serta pemilihan mesin kapal yang tepat berdasarkan alokasi anggaran.

Kesimpulan

- a. Industri Pertahanan, dengan landasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 memberikan kepastian hukum kepada BUMS untuk mengembangkan usaha repair, dock, shipyards di sektor maritim. Dua perusahaan yang memanfaatkan peluang tersebut yaitu PT.Palindo marine dan PT.Karimun Anugerah Sejati, memiliki kemampuan membangun KCR 60M mendukung kebutuhan Alutsista TNI AL
- b. Faktor yang mendukung adalah kebijakan pemerintah yang menggunakan visi pembangunan bidang maritim dengan kebijakan bebas Ppn untuk barang masuk Batam meringankan biaya produksi kapal. Faktor yang menghambat, material pembangunan kapal tergantung pada

pengiriman barang dari luar Batam dengan alternatif mendatangkan dari Singapura.

Daftar Pustaka

- Bambang, S. (1997). Pengukuran kinerja perusahaan dengan balanced scorecard: Bentuk, mekanisme, dan prospek aplikasinya pada BUMN. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 12(4).
- Creswell, J. W. (2011). Educational research planning, conducting and evaluating:

 Quantitative and qualitative research. 4th Edition. Boston:
 Pearson.
- Creswel, J. W. (2013). Research Desaign Pendekatan Kualitatif, Kwantitatif dan R & D. Alfabeta Bandung
- Densin, S. (2009). Qualitatif research. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Dombrowski, P. & Gohlz, E. (2006). Buying military transformation:
 Technological innovation and defense industry. New York:
 Columbia University Press.
- Hunger, J. D. & Wheelan, T. L. (2003). Manajemen Strategis. Yogjakarta: Andi
- Kemhan RI. (2011). Pengantar menteri pertahanan dalam penyelarasan minimum essential force (MEF) sebagai komponen utama.
- Kountur, R. (2008). Manajemen resiko perusahaan. Jakarta: PPM
- Moleong, L. J. (2013). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T. Renja Rosdakarya.
- Muhaimin, Y. A. (2005). Masalah pembinaan pertahanan indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mulyadi. (2005). Alternatif pemacuan kinerja personel dengan pengelolaan kinerja terpadu berbasis balanced scorecard. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 20(3), 270-286.

- Nugroho, R. (2014). Metode kebijakan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2015). Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Permenhan No. 39 Tahun 2015 tentang MEF TNI
- Permenhan No. 54 Tahun 2014 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia beserta Lampirannya.
- Perpres No. 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
- Prabowo. (2012). Desain pertahanan negara aspek militer. PPSN.
- PT Indodata Development Center (2015)
 Profil Perusahaan Galangan Kapal
 Swasta (Shipyard) di Indonesia.
 Research Management
 Development Consultan.
- Rampersad, K. (2005). Total performance scorecard. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2016). SWOT balancescorecard. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sucipto, J. W. (2015). Challenges and opportunities in Indonesia. shipbuilding Industries.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Bandung: Alfabeta.
- Supriyatno, M. (2014). Tentang ilmu pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Suryohadiprojo, S. (2005). Membangun pertahanan negara yang modern dan efektif. Jakarta: Ikrar madani.
- Tunas, B. (2010). Memahami dan memecahkan masalah dengan pendekatan kesisteman. Jakarta: Nimas Multima.

- UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI UUD RI Tahun 1945
- Wahidi, R. (2013). Potret pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di indonesia. Bogor: Kekal Press.
- Wahidi, R. (2014). Kawasan industri indonesia sebuah konsep perencanaan dan aplikasinya. Bogor: Grafika.
- Wahyuni, S. (2003). Qualitative research methode: Theory and practice. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyono (2007). Indonesia Negara Maritim. Yayasan Senapati Nusantara.
- Widjajanto, A. (2012). Dinamika persenjataan dan reviltasisasi industri pertahanan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wiliam, S. J & Sum, S. C. Manajemen operasi perspektif asia.
- Yudi, T.(2012). Pembangunan KRI oleh industri kapal dalam negeri (PT.PAL,PT.Dok Kodja Bahari, PT.Palindo marine).